

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi Akuntansi Berbasis Akrua

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tepat diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009:3). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan akuntansi adalah suatu proses pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi sebagai aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan bagi orang yang memerlukannya.

Basis akrual adalah penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya transaksi, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima ataupun biaya tersebut dibayarkan (*Cash Basis*). Ada dua metode pencatatan akuntansi, berbasis kas dan berbasis akrual. Akuntansi berbasis kas berarti hanya mencatat transaksi pada saat terjadinya transaksi kas. Akuntansi berbasis akrual selain mencatat pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang organisasi. Oleh karena itu, akuntansi berbasis akrual memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan organisasi daripada akuntansi berbasis kas. Namun, jelas bahwa catatan menggunakan basis akrual lebih kompleks daripada basis kas.



2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donatur, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Menurut Abdul Halim (2008:35) akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Berdasarkan pengertian akuntansi pemerintah daerah maka Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan skema menyeluruh yang ditunjukkan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi (Deddi Nordiawan, 2006:5).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan

keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

2.3. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Berbasis AkruaI adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Melalui PP 71 Tahun 2010 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005) SAP kini didasarkan pada basis akruaI. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap pada Pemerintah Pusat akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis AkruaI secara bertahap pada Pemerintah Daerah akan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

a. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

Dalam permendagri No.64 tahun 2013 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa:

SAP Berbasis AkruaI adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akruaI, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Akhirnya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mengenai pemberlakuan akuntansi berbasis akruaI telah terbit. Pada tanggal 3 Desember 2013, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah. Terbitnya peraturan menteri dalam negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Peraturan menteri dalam negeri tersebut akan menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan akuntansi pemerintah daerah dan sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD), termasuk Bagan Akun Standar (BAS), yang selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan kepala daerah. Sesuai pasal 10 ayat 1 permendagri tersebut, peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan SAPD tersebut harus sudah ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Mei 2014. Sesuai PP Nomor 71 tahun 2010, penerapan SAP berbasis akruaI pada pemerintah daerah harus dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015. Jadi, masih ada waktu setahun lagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum SAP berbasis akruaI benar-benar diterapkan pada awal tahun anggaran 2015.

Terbitnya Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut semakin memperjelas model akuntansi berbasis akruaI yang akan diterapkan nantinya terutama kalau kita pelajari Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD) dan Lampiran III (Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah yang ditetapkan hingga 5 digit (rincian obyek)). Beberapa hal yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut:

- ✓ Rancangan SAPD berbasis akruaI yang akan diterapkan masih sama dengan *Cash Toward Accrual* (CTA) yaitu terdiri dari SAPD pada SKPD sebagai entitas akuntansi dan SAPD pada SKPKD sebagai entitas pelaporan. Transaksi-transaksi yang melibatkan kedua sistem dijumpai oleh dua akun



berikut: Aset Untuk Dikonsolidasikan – RK SKPD (akun untuk SKPKD dengan klasifikasi Aset Lancar) dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan – RK PPKD (akun untuk SKPD dengan klasifikasi Ekuitas). Klasifikasi RK PPKD pada akuntansi akrual tersebut berbeda dengan klasifikasi pada akuntansi berbasis CTA, dimana RK PPKD diklasifikasikan pada kewajiban jangka pendek. Transaksi-transaksi yang melibatkan kedua sistem yang menggunakan akun RK SKPD dan RK PPKD hanya diterapkan pada transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Operasional (LO), misalnya penyetoran penerimaan PAD oleh bendahara penerimaan ke kas daerah, pengakuan akun beban yang menggunakan mekanisme LS, pengajuan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan. Akun RK SKPD dan RK PPKD harus bersaldo sama ketika dilakukan konsolidasi laporan keuangan oleh PPKD selaku BUD. Sesuai SAP, akun-akun resiprokal tersebut dapat dilakukan eliminasi atau tidak perlu dieliminasi.

- ✓ Adanya akuntansi anggaran: Estimasi Pendapatan (debit), Estimasi Penerimaan Pembiayaan (debit), Apropriasi Belanja (kredit), dan Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (kredit). Pencatatan akuntansi anggaran dilaksanakan ketika DPA SKPD dan DPA SKPKD disahkan oleh PPKF dan disetujui oleh sekretaris daerah. Selisih akun estimasi dan apropriasi di catat dalam akun Estimasi Perubahan SAL. Akun Estimasi Perubahan SAL diklasifikasikan sebagai Ekuitas SAL. Ketika akhir tahun akun-akun anggaran dikosongkan dengan cara membuat ayat jurnal penutup.
- ✓ Akun ekuitas tidak lagi terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan, namun

diklasifikasikan sebagai: Ekuitas, Ekuitas SAL, dan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan.

- ✓ Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA): Pendapatan LRA, Belanja, Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaran Pembiayaan, ketika diakui selalu dilawankan dengan akun Estimasi perubahan SAL (db Estimasi Perubahan SAL, kr Pendapatan LRA/Penerimaan Pembiayaan dan db Belanja/Pengeluaran Pembiayaan, kr Estimasi Perubahan SAL). Pada akhir tahun, akun-akun LRA akan dikosongkan dengan membuat ayat jurnal penutup: db Pendapatan LRA/Penerimaan Pembiayaan dan kr Belanja/Pengeluaran Pembiayaan, dimana selisihnya akan dicatat dalam akun Surplus/Defisit – LRA. Akun Surplus/Defisit – LRA diklasifikasikan dalam akun Ekuitas SAL. Selanjutnya akun Surplus/Defisit – LRA tersebut akan ditutup ke akun Estimasi Perubahan SAL yang terbentuk selama transaksi dalam tahun berjalan.
- ✓ Berbeda dengan akuntansi berbasis CTA, pada akuntansi berbasis akrual akun Surplus/Defisit, Pembiayaan Netto, dan SILPA Tahun Berkenaan bukanlah sebuah akun. Ketiganya hanya merupakan perhitungan semata dalam format Laporan Realisasi Anggaran.
- ✓ Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan Laporan Operasional (LO) berupa Pendapatan- LO dan Beban, pada akhir tahun akan ditutup ke akun Surplus/Defisit LO. Akun Surplus/Defisit LO adalah akun Ekuitas. Selanjutnya akun Surplus/Defisit LO tersebut akan ditutup ke akun Ekuitas. Akun Surplus/Defisit LO dan akun Ekuitas sama-sama berada dalam jenis akun Ekuitas (Lihat Lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

- ✓ Laporan keuangan yang wajib dibuat oleh SKPD (termasuk SKPKD selaku SKPD) adalah: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan SKPKD selaku BUD wajib membuat laporan keuangan berupa Neraca, LRA, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Konsolidasian, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan berupa Neraca, LRA, LO dihasilkan melalui pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi selama tahun berjalan melalui masing-masing akun-akun Neraca, LRA, dan LO. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan SAL, dan Laporan Arus Kas dibuat berdasarkan informasi yang telah dihasilkan dari Neraca, LRA, dan LO.
- ✓ Mengenai pengakuan pendapatan LRA, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 telah menetapkan bahwa Pendapatan LRA diakui ketika kas diterima di rekening kas umum daerah, diterima oleh SKPD, atau oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Khusus untuk pengakuan Pendapatan LRA ketika kas telah diterima oleh SKPD melalui bendahara penerimaan, hal ini bertentangan dengan prinsip pengakuan Pendapatan LRA sesuai SAP (meskipun hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2). Sedangkan kriteria pengakuan Pendapatan LRA yang ketiga, meskipun tidak diberikan contohnya secara jelas dalam Lampiran I (Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah) dan Lampiran II (Panduan Penyusunan SAPD), hal itu jelas terkait dengan pengakuan Pendapatan LRA oleh SKPD yang berstatus BLUD. Dalam Bagan Akun Standar juga telah diakomodir akun Kas di

BLUD dan akun Pendapatan BLUD –LRA dalam jenis akun Lain-lain PAD Yang Sah-LRA.

- ✓ Untuk pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 menetapkan bahwa pengakuan belanja tersebut dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh pengguna anggaran. Artinya, ketika SPM telah ditandatangani oleh pengguna anggaran, maka PPK SKPD harus mengakui belanja tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan SAP mengenai pengakuan belanja yang pembayarannya melalui bendahara pengeluaran, yaitu diakui ketika telah mendapatkan pengesahan oleh unit yang memiliki fungsi sebagai perbendaharaan (BUD) dengan diterbitkannya SP2D GU dan SP2D Nihil (meski hal ini dibenarkan oleh IPSAP No 2).
- ✓ Pengakuan beban dalam akuntansi akrual tidak selalu berkaitan dengan dikeluarkannya kas. Ketika sudah timbul kewajiban, maka beban harus segera diakui. Sedangkan untuk pengakuan belanja dilakukan ketika sudah terdapat pengeluaran kas dari kas daerah atau pengesahan oleh BUD, meskipun dalam jurnal-jurnal transaksinya akun Pendapatan LRA dan akun Belanja tidak dilawankan dengan akun Kas di Kas Daerah (tetapi dengan akun Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih/SAL). Oleh karenanya, perlu dipahami bahwa pencatatan beban dan belanja bisa berbeda waktunya.

2.4 Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Pemerintah

A. Gambaran Umum Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Seperti yang dijelaskan dalam Kerangka Konseptual pada Lampiran 1 PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi

keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Unsur laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

- ✓ Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- ✓ Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas
- ✓ Catatan Atas Laporan Keuangan

B. Laporan Realisasi Anggaran

1) Pengertian dan Tujuan

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasinya dalam suatu periode tertentu.

2) Manfaat

a. Menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan –LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- ✓ Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- ✓ Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

b. Menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- ✓ Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat
- ✓ Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD)
- ✓ Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Struktur dan Isi

Tabel 2.1 Laporan Realisasi Anggaran

| No | Uraian | Anggaran (20x1) | Realisasi (20x1) | Presentase (%) | Realisasi (20x0) |
|----|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1 | Pendapatan- LRA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2 | Belanja | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
| 3 | Transfer | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
| 4 | Surplus/defisit-LRA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Penerimaan pembiayaan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Pengeluaran pembiayaan | (xxx) | (xxx) | (xxx) | (xxx) |
| 7 | Pembiayaan neto | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 8 | Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) | xxx | xxx | xxx | xxx |

C. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1) Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan SAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

2) Manfaat

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Struktur dan Isi

Tabel 2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

| No | Uraian | 20x1 | 20x0 |
|----|--|-------|-------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | xxx | xxx |
| 2 | Penggunaan Saldo Anggaran Lebih | (xxx) | (xxx) |
| 3 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan | xxx | xxx |
| 4 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan | xxx | xxx |
| 5 | Lain-lain | xxx | xxx |
| 6 | Saldo Anggaran Lebih Akhir | xxx | xxx |

D. Neraca

1) Pengertian dan Tujuan

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

2) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah pada tanggal tertentu.

3) Struktur dan Isi

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya

menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Dengan demikian, neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos yang ada di neraca antara lain:

1. Kas dan setara kas, kas merupakan uang tunai yang likuid sehingga ditempatkan pada urutan teratas dari aset. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli tiga bulan atau kurang yang memenuhi syarat sebagai setara kas.
2. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama dua belas bulan atau kurang. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka tiga sampai dua belas bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.
3. Piutang pajak dan bukan pajak antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
5. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek



pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.

6. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.
7. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
8. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.
9. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

E. Laporan Operasional

1) Pengertian dan Tujuan

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



3) Struktur dan Isi

Tabel 2.3 Laporan Operasional

| No | Uraian | 20x1 | 20x0 | Kenaikan/ Penurunan | Presentase (%) |
|----|--|------|------|------------------------|-------------------|
| 1 | Pendapatan-LO | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 2 | Beban | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 3 | Surplus/defisit dari operasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Kegiatan non operasional | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Surplus/defisit sebelum pos luar biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Pos luar biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | Surplus/defisit-LO | xxx | xxx | xxx | xxx |

F. Laporan Arus Kas

1) Pengertian dan Tujuan

Laporan Arus Kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoria. Tujuannya untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk memberikan informasi pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

2) Manfaat

- ✓ Sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
- ✓ Alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
- ✓ Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

3) Struktur dan Isi

1. Aktivitas operasi

Arus kas dari aktivitas operasi:

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Arus kas masuk | : | xxx |
| Arus kas keluar | : | (xxx) |

Arus kas bersih dari kegiatan operasi : xxx

2. Aktivitas investasi

Arus kas dari aktivitas investasi:

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Arus kas masuk | : | xxx |
| Arus kas keluar | : | (xxx) |

Arus kas bersih dari kegiatan investasi: xxx

3. Aktivitas pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan:

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Arus kas masuk | : | xxx |
| Arus kas keluar | : | (xxx) |

Arus kas bersih dari kegiatan pendanaan: xxx

4. Aktivitas transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris:

| | | |
|-----------------|---|-------|
| Arus kas masuk | : | xxx |
| Arus kas keluar | : | (xxx) |

Arus kas bersih dari kegiatan transitoris: xxx

G. Laporan Perubahan Ekuitas

1) Pengertian dan Tujuan

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2) Manfaat

Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

3) Struktur dan Isi

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi yang koreksi kesalahan mendasar:
 - ✓ Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
 - ✓ Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
4. Ekuitas Akhir

H. Catatan Atas Laporan Keuangan

a. Pengertian dan Tujuan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan dan oleh karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan catatan atas laporan keuangan. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.



b. Manfaat

Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

c. Struktur dan Isi

- ✓ Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi
- ✓ Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro
- ✓ Ikhtisar tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- ✓ Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- ✓ Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- ✓ Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.5 Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Menurut Stoner (dalam Kholiq, 2014) kinerja (*performance*) merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Menurut Laurensius dan Halim (dalam Kholiq, 2014) bahwa pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Tujuan pengukuran kinerja pemerintah adalah untuk memotivasi pemerintah daerah meningkatkan kinerjanya, khusus dalam merealisasikan *good governance* serta memberikan layanan publik. Salah satu cara yang digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan

menggunakan tolok ukur tertentu yang objektif dan dilakukan secara berkala, Rivai (dalam Kholiq, 2014). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan *review* atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berhasil atau tidaknya tugas dan fungsi yang dilaksanakan tergantung pada sumber daya manusia yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usahanya terhadap organisasi. Maka dari itu, kinerja dari pegawai penyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang profesional sangat dituntut untuk menciptakan *good governance*.

2.6 Pengaruh Tingkat Pemahaman Penyusunan Laporan Keuangan Dilihat Dari:

a. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan UU dan Peraturan Pemerintah Tahun 2006 pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuasaan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Fatiah, 2014).

Keberadaan manusia sebagai sumber daya manusia didalam suatu organisasi atau instansi dipandang sangatlah penting karena sumber daya manusia yang menjalankan organisasi, dengan daya pikir, karya, kreativitas, serta peran manusia yang dapat disaksikan di dalam organisasi. Menurut Matidas (dalam Aidil, 2010) mengatakan bahwa “Sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada”. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan daerah, yang lebih efektif

dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi.

Meurut Gaa dan Thore (dalam Aidil, 2010) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut.

b. Sistem Teknologi Informasi Akuntansi

Sistem Teknologi informasi termasuk komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), database, jaringan (*internet, intranet*) dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan. Sistem teknologi informasi akuntansi tetap mengumpulkan, memproses dan menyimpan data dan setiap proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas. Sistem teknologi informasi akuntansi juga mengontrol keakuratan. Dan hal terpenting segala tahapan akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. *Output* lebih rapi, dalam bentuk yang lebih bervariasi, dan lebih banyak. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Jumali dkk (2002) bahwa, pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi.

Dalam penjelasan PP Nomor 56 Tahun 2005 pada Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan proses pengembangan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Penggunaan teknologi informasi termasuk adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) penggunaan

informasi canggih teknologi sehingga pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Wilkinson dkk, 2000). Oleh sebab itu pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit.

Kehadiran sistem teknologi akuntansi memberikan banyak manfaat bagi organisasi, seperti mampu meringankan kegiatan yang kompleks dan menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, tepat waktu, lengkap, dipahami, dan diuji dalam konteks perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen.

c. Pelatihan Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 1 ayat 1 mengatakan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut dengan Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.

Dalam PP No. 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 menyebutkan tujuan dari Diklat adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
- b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.



- d. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan yang baik.

Jenis-jenis Diklat disebutkan dalam PP No.101 tahun 2000 terdapat dalam pasal 4 sampai pasal 12 yaitu:

1. Diklat Prajabatan

Diklat Prajabatan merupakan diklat yang merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Diklat Prajabatan terdiri dari:

- a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I
- b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II
- c. Diklat Prajabatan Golongan III untuk menjadi PNS Golongan III

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintah negara, bidang tugas dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.

2. Diklat dalam Jabatan

Diklat dalam Jabatan terdiri dari:

a. Diklat Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan yang kemudian disingkat Diklatpim, dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri dari:

- a) Diklatpim tingkat IV adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon IV



- b) Diklatpim tingkat III adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon III
- c) Diklatpim tingkat II adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon II
- d) Diklatpim tingkat I adalah Diklatpim untuk jabatan struktural eselon I

b. Diklat Fungsional

Diklat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing.

c. Diklat Teknis

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, tidak ada penelitian dengan judul yang sama persis seperti judul penelitian yang dilakukan ini. Namun beberapa penelitian ini dipakai sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun | Judul Artikel | Tujuan Penelitian | Variabel | Hasil/Temuan/Kesimpulan |
|----|--|--|---|--|--|
| 1. | Kariyoto(2016) | Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Malang Dalam Mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. | untuk mengetahui dan menganalisis kehadiran peraturan pemerintah no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang mewajibkan pemerintah Kota Malang untuk menerapkan laporan keuangan berbasis akrual pada tahu 2015. | Kesiapan pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. | Hasil penelitian dari hasil wawancara di Kec. Blimbing, secara umum pemahaman tentang basis akrual itu suatu standar, standar pemerintahan dimana mengakui kejadian ekonomi pada saat terjadinya kejadian tersebut. Bukan pada saat penerimaan kas, pandangan responden telah sesuai dengan makna basis akrual. |
| 2. | Ni Made Ari Widyastuti, Edi Sujana, I Made Pradana Adiputra. (2015). | Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Kabupaten Gianyar | Untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilihat dari kesiapan SDM, Sistem Informasi Akuntansi dan | Kesiapan Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. | Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Gianyar belum siap dalam penerapan basis akrual karena terkendala dalam sumber daya manusia. Hal ini terlihat pada saat peneliti mewawancarai beberapa pegawai di beberapa SKPD di Kabupaten Gianyar. Pemahaman mereka tentang basis akrual tidak sepenuhnya dimengerti |

“ANALISIS PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI, DAN PELATIHAN KERJA PADA KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKPD DAN PPKD DI KABUPATEN BELU)”
 Author: JANET PAULA DE JESUS NPK: A.2014.1.32720

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | komitmen dari organisasi pemerintah Kabupaten Gianyar. | | dan masih memerlukan bantuan dari pihak lain untuk memahami dan mempraktekkan basis ini. |
| 3 | Engson Qinaris Jaladri dan Ikhsan Budi Riharjo.(2016) | Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. | Untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, ketersediaan sarana dan prasarana dan komitmen organisasi terhadap efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. | Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua,ketersediaan sarana dan prasarana serta komitmen organisasi. | Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada SKPD sudah sangat efektif. Hal ini ditunjukkan pada 4 faktor yang mempengaruhi yaitu terdiri dari Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Ketersediaan Sarana dan Prasarana dan Komitmen Organisasi. |
| 4 | Sony Lamonisi (2016) | Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Kota Tomohon. | Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. | Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan berbasis Akrua | penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang dilihat dari pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini diindikasikan bahwa para pegawai memiliki tingkat pemahaman akuntansi yang baik dan dalam proses pelaksanaan akuntansi dilakukan dengan baik dan benar sampai menjadi suatu laporan keuangan. |
| 5 | Zulkifli (2017) | Pengaruh Pemahaman SAP Berbasis Akrua, Pendidikan, dan Pelatihan, Serta Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tanjungpinang. | Untuk mengetahui pengaruh dari pemahaman SAP berbasis akrual, pendidikan dan pelatihan, serta latar belakang pendidikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah pada pemerintah Kota Tanjungpinang. | Pemahaman SAP berbasis akrual, pendidikan dan pelatihan, latar belakang pendidikan, kinerja penyusunan laporan keuangan daerah. | <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah dengan nilai signifikansi sebesar 0.000, - Pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah dengan signifikansi sebesar 0,000, - Latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah dengan signifikansi sebesar 0.808 - Secara simultan pemahaman SAP berbasis akrual, pendidikan, dan |

“ANALISIS PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BERDASARKAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI AKUNTANSI, DAN PELATIHAN KERJA PADA KINERJA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA SKPD DAN PPKD DI KABUPATEN BELU)”

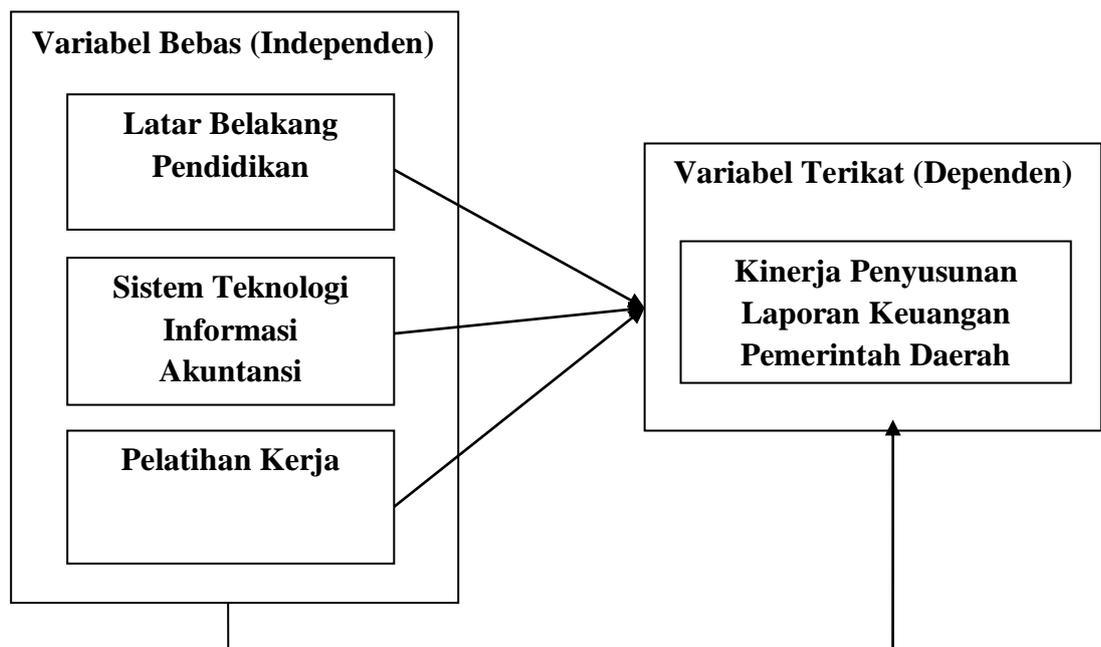
Author: JANET PAULA DE JESUS NPK: A.2014.1.32720

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | pelatihan, serta latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan daerah. |
| 6 | Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati. (2014). | Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Klungkung) | Untuk menganalisis pengaruh pemahaman SAP terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. | Latar belakang pendidikan, pemahaman standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. | <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan daerah - Pemahaman SAP dan latar belakang pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah - Pemahaman SAP berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah - Latar belakang pendidikan berpengaruh positif terhadap penyajian laporan keuangan pemerintah daerah - Pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan latar belakang pendidikan secara simultan berpengaruh pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. |

2.8 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual mengenai hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka konseptual di atas model penelitian ini menggambarkan pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari variabel latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi, pelatihan kerja dan kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2.9 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis atau hipotesa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat (teori, proporsi dan sebagainya) meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan; anggapan dasar.

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya dan kerangka penelitian yang dikembangkan maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Latar Belakang Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan dalam (Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tingkat pendidikan dapat menentukan kapasitas seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Meuthia dan Endrawati (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, baik pendidikan formal dan non formal sesuai dengan bidang pekerjaan maka semakin tinggi pula pengalaman intelektual yang dimiliki. Sehingga pegawai keuangan dengan pendidikan tinggi akan memudahkan dalam memahami dan mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah yang berlaku sekarang yaitu basis akrual dalam hal pencatatan transaksi, maupun pengakuan dan pengukuran akun-akun laporan keuangan. Pada dasarnya, dengan adanya tingkat pendidikan yang memadai memiliki pengaruh terhadap pemahaman pegawai terhadap pekerjaan yang dilakukan, karena dengan adanya tingkat pendidikan yang memadai, pegawai dapat memahami dan melakukan pekerjaannya dengan baik. Dalam kaitannya dengan penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan yang berasal dari jurusan pembukuan/akuntansi dapat saja memiliki tingkat pemahaman penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi berbasis akrual yang lebih baik dibandingkan dengan pegawai yang bukan berlatar belakang pendidikan dari jurusan pembukuan/akuntansi. Pendapat bahwa pegawai yang berasal dari jurusan pembukuan/akuntansi lebih baik atau lebih mudah dalam memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi berbasis akrual karena mereka telah memiliki bekal pengetahuan yang sesuai dengan pekerjaan penyusunan laporan keuangan tersebut saat mereka



menimba ilmu baik di tingkat SMU maupun tingkat akademi/ perguruan tinggi. Sementara itu, kondisi sebaliknya akan dialami oleh pegawai yang bukan berasal dari jurusan pembukuan/akuntansi. Mereka akan membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi berbasis akrual mengingat mereka tidak mempunyai bekal pengetahuan di bidang pembukuan/akuntansi.

Dalam penelitian Wayan Kusuma Wiraputra, Ni Kadek Sinarwati, Nyoman Trisna Herawati (2014) mengatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Zulkifli (2017) juga mengatakan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

b) Sistem Teknologi Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam rangka mendukung penerapan basis akuntansi akrual, penggunaan sistem teknologi informasi yang andal amat dibutuhkan guna mendukung keberhasilan pengolahan data baik pada masa transisi maupun pada masa penerapan basis akrual secara penuh. Persiapan di bidang teknologi informasi terutama diarahkan untuk pengembangan sistem akuntansi.

Analisis kesiapan sistem teknologi informasi dapat dilihat dari sistem yang digunakan untuk membuat pelaporan keuangan daerah. Penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem teknologi akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit. Pemerintah Kabupaten Belu telah menyiapkan sistem teknologi untuk membuat laporan keuangan yang diberikan oleh pusat. Sistem teknologi yang

bernama SIMDA merupakan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang berbasis akrual.

Dalam penelitian Engson Qinaris Jaladri dan Ikhsan Budi Riharjo (2016) mengatakan bahwa sistem teknologi informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Sistem teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

c) Pelatihan Kerja

Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara. Jabatan penyusun laporan keuangan memiliki tugas menyusun laporan keuangan instansi berdasarkan pedoman penyusunan yang ada dan data yang telah terinventarisasi untuk bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, jabatan penyusun laporan keuangan akan memiliki pemahaman lebih terhadap berbagai kebijakan akuntansi. Hal ini dikarenakan tuntutan kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan wajib berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Menurut Zulkifli (2017) mengatakan bahwa pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:



H3 : Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

d. Pengaruh tingkat pemahaman akuntansi berbasis akrual berdasarkan latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi dan pelatihan kerja pada kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

Salah satu upaya konkrit yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan cara penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah daerah yang baik dan benar dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku saat ini. Pemerintah dituntut untuk memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari kualitas laporan keuangannya, dalam penyusunan laporan keuangan daerah kinerja pegawai yang profesional sangat dibutuhkan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat selesai dengan tepat waktu, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan ekonomi maupun politik untuk masa mendatang. Selain latar belakang pendidikan pegawai yang dikehendaki memiliki pendidikan yang sesuai dengan pekerjaannya dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, diperlukan juga sistem informasi akuntansi yang meliputi, perangkat keras, perangkat lunak, *software* (sistem informasi manajemen daerah/SIMDA) yang dipakai untuk menyajikan laporan keuangan. Serta pelatihan kerja yang diberikan kepada para pegawai dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam menyajikan laporan keuangan yang baik, cepat dan tepat waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah bisa diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi dan

pelatihan kerja dari para pegawai yang terlibat langsung dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Dalam penelitian yang dikemukakan oleh Zulkifli (2010), Junita Putri Rajana Hrp (2009) dan Irine Chyntia (2015) menguatkan penelitian ini bahwa variabel latar belakang pendidikan, sistem teknologi informasi akuntansi dan pelatihan kerja secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

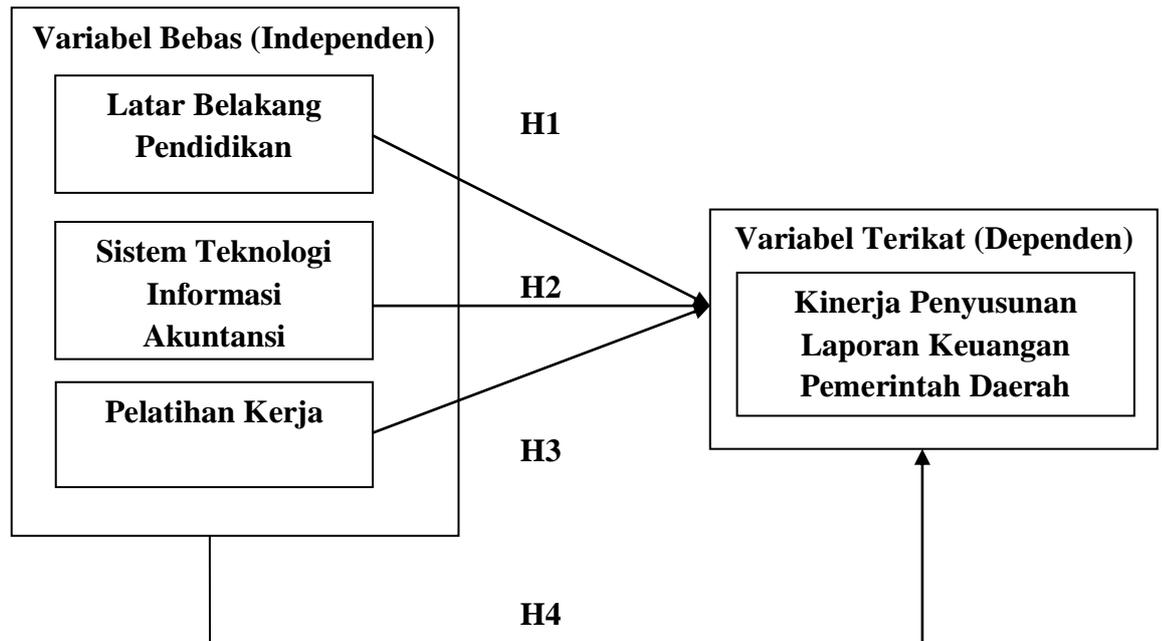
Berdasarkan penjelasan di atas maka diambil hipotesis sebagai berikut:

H4: Latar Belakang Pendidikan, Sistem Teknologi Informasi Akuntansi dan Pelatihan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.10 Model Hipotesis

Berdasarkan pengembangan hipotesis di atas maka model hipotesis pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Model Hipotesis



Adapun model hipotesis di atas meliputi:

H1 : Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

H2 : Sistem teknologi informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

H3 : Pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

H4: Latar Belakang Pendidikan, Sistem Teknologi Informasi Akuntansi dan Pelatihan Kerja berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah